

**Konsep Pemerintahan Islam dalam Pandangan Ibnu Khaldun  
(Analisis terhadap Teori 'ashabiyah)**

**Hanna Widayani**

[hannawidayani@gmail.com](mailto:hannawidayani@gmail.com)

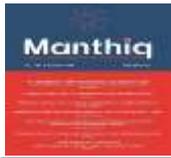
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

**Abstract:** Khilafah system is essentially a political discussion, because it discusses the highest position in government, and certainly is a discussion of the concept of government. The Islamic government system is a caliphate system, which has a unique government pattern that is very different from other government patterns. Shari'ah which is applied to realize government, regulation of people's affairs and foreign relations, comes from Allah SWT. Ibn Khaldun is perhaps one of the intellectuals who can be said that way. Departing from direct contact and relations to various conditions and political developments encountered in various places, as well as his analysis of previous history, plus his observations using a sociological approach, making new contributions to scientific development at the time, and opening new horizons for further scientific development. Therefore, it is not wrong if many intellectuals and academics place it as a modern scientist. The problem in this study is how Ibn Khaldun views the concept of Islamic government. The purpose of this study is to describe Ibn Khaldun's view of the concept of Islamic government. The method used in this research approach is a qualitative descriptive method. While this type of research is library research. The primary data source is the core or primary data source namely Abdurrahman Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun Volume III, while secondary data sources are complementary data sources obtained from books written by other authors or other books relating to the study of figures, title or research problem statement.

**Key words:** concept of Islamic government, Ibn Khaldun, theory of 'ashabiyah.

**Abstrak:** Sistem khilafah pada hakekatnya merupakan pembahasan politik, sebab membicarakan suatu jabatan yang paling tinggi dalam pemerintahan, dan tentunya merupakan pembahasan tentang konsep pemerintahan. Sistem pemerintahan Islam adalah sistem khilafah, yang mempunyai pola pemerintahan unik yang sangat berbeda dari pola pemerintahan lainnya. Syari'at yang diterapkan untuk mewujudkan pemerintahan, pengaturan urusan rakyat dan hubungan luar negerinya, itu berasal dari Allah SWT. Ibnu Khaldun barangkali merupakan salah satu intelektual yang bisa dikatakan demikian. Berangkat dari kontak dan hubungan secara langsung terhadap berbagai kondisi dan perkembangan politik yang ditemui di berbagai tempat, serta analisisnya terhadap sejarah sebelumnya, ditambah lagi pengamatannya yang menggunakan pendekatan sosiologis, memberikan kontribusi baru bagi pengembangan keilmuan saat itu, dan membuka cakrawala baru bagi pengembangan keilmuan selanjutnya. Karenanya, tidak salah apabila banyak kalangan intelektual maupun akademisi menempatkannya sebagai ilmuwan modern. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Ibnu Khaldun terhadap konsep pemerintahan Islam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendisripsikan pandangan Ibnu Khaldun terhadap konsep pemerintahan Islam. Metode yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sedangkan Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research). Adapun sumber data primer adalah sumber data inti atau pokok yaitu Abdurrahman Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun Jilid III, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang diperoleh dari bukubuku karangan para penulis lainnya atau buku-buku yang lain yang berkaitan dengan kajian tokoh, judul atau rumusan masalah penelitian.

**Kata kunci :** konsep pemerintah Islam, Ibnu Khaldun, teori ' ashabiyah.



## Pendahuluan

Manusia adalah makhluk politik atau sosial.<sup>1</sup> Sebagai makhluk politik, sifat sosial manusia berasal dari kenyataan bahwa untuk menolong dirinya sendiri dalam aktivitas yang diperlukan untuk mempertahankan hidupnya, manusia harus menyandarkan diri kepada orang lain. Tak ada orang secara mutlak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kebutuhan manusia hanya akan dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan manusia yang lain.<sup>2</sup> Oleh karena itu, adanya organisasi kemasyarakatan adalah suatu keharusan. Kodrat manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Ia membutuhkan orang lain untuk memenuhinya. Tanpa hal ini eksistensi manusia tidak akan sempurna.<sup>3</sup> Ketika umat manusia telah mencapai organisasi kemasyarakatan, manusia pun memerlukan seseorang yang akan melaksanakan kewibawaan dan memelihara mereka.<sup>4</sup> Dengan kata lain diperlukannya seorang pemimpin yang paling kuat dan disegani oleh kelompoknya. Seorang yang demikian disebut sebagai kepala negara atau dalam Islam disebut sebagai khilafah dan yang menjalankannya yaitu khalifah.<sup>5</sup>

Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukumhukum syari'at Islam.

Dalam al-Qur'an, Allah SWT telah memerintahkan Rasullullah SAW agar menegakkan hukum diantara kaum muslimin dengan hukum yang telah diturunkannya.<sup>6</sup>

Sistem khilafah pada hakekatnya merupakan pembahasan politik, sebab membicarakan suatu jabatan yang paling tinggi dalam pemerintahan, dan tentunya merupakan pembahasan tentang konsep pemerintahan. Sistem pemerintahan Islam adalah sistem khilafah, yang mempunyai pola pemerintahan unik yang sangat berbeda dari pola pemerintahan lainnya. Syari'at yang diterapkan untuk mewujudkan pemerintahan, pengaturan urusan rakyat dan hubungan luar negerinya, itu berasal dari Allah SWT.<sup>7</sup>

Ibnu Khaldun barangkali merupakan salah satu intelektual yang bisa dikatakan demikian. Berangkat dari kontak dan hubungan secara langsung terhadap berbagai kondisi dan perkembangan politik yang ditemui di berbagai tempat, serta analisisnya terhadap sejarah sebelumnya, ditambah lagi pengamatannya yang menggunakan pendekatan sosiologis, memberikan kontribusi baru bagi pengembangan keilmuan saat itu, dan membuka cakrawala baru bagi pengembangan keilmuan selanjutnya. Karenanya, tidak salah apabila banyak kalangan intelektual maupun akademisi menempatkannya sebagai ilmuan modern.

Terkait dengan hal ini, menurut Ibn Khaldun khilafah adalah pemerintahan yang berlandaskan agama yang memerintahkan rakyatnya sesuai dengan petunjuk agama baik dalam hal keduniawian atau akhirat. Menurutnya model pemerintahan seperti

---

<sup>1</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 99

<sup>2</sup> Wendy Melfa dan Solihin Siddiq, *Paradigma Pengembangan Masyarakat Islam: Studi Epistemologis Pemikiran Ibnu Khaldun*, (Bandar Lampung: Matakata, 2007), hlm. 77

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 48

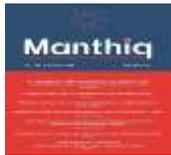
<sup>4</sup> Wendy Melfa dan Solihin Siddiq, *Paradigma Pengembangan Masyarakat Islam...*, hlm. 80

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam...*, hlm. 49

---

<sup>6</sup> Taqiyudin An Nabhani, *Sistem Khilafah: Konsep Kenegaraan dan Kepemimpinan Umat Islam Seluruh Dunia*, Terj. Muhammad Al Khaththath dkk, (Jakarta: Khazanah Islam, 1995), hlm. 1-2

<sup>7</sup> <sup>8</sup>Taqiyudin An Nabhani, *Sistem Khilafah: Konsep Kenegaraan dan Kepemimpinan Umat Islam Seluruh Dunia*, Terj. Muhammad Al Khaththath dkk..., hlm. 74-76



inilah yang terbaik, karena dengan hukum yang bersumber dari ajaran agama akan terjamin tidak saja keamanan dan kesejahteraan di dunia tetapi juga di akhirat. Dan karena yang dipakai sebagai asas kebijaksanaan pemerintahan itu adalah ajaran agama, khususnya Islam, maka kepala negara disebut Khalifah dan Imam. Khalifah, oleh karena ia adalah pengganti Nabi dalam memelihara kelestarian agama dan kesejahteraan duniawi rakyatnya. Imam, karena sebagai pemimpin dia ibarat Imam shalat yang harus diikuti oleh rakyatnya sebagai makmum. Lembaga imamah adalah wajib menurut hukum agama atau fardhu kifayah, yang dibuktikan dengan dibai'atnya Abu Bakar sebagai khalifah.<sup>8</sup>

Metode yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk meneliti suatu objek, baik berupa nilai-nilai budaya manusia, sistem pemikiran filsafat, nilai-nilai etika, nilai karya seni, sekelompok manusia, peristiwa atau objek budaya lainnya.<sup>9</sup> Sedangkan Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) yaitu penelitian yang mengkaji objek material karya-karya, sumber datanya dikumpulkan dari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan objek material penelitian tersebut.<sup>10</sup> Selain bahan cetak atau karya grafis berupa buku, jurnal, majalah, koran, berbagai jenis laporan dan dokumen, perpustakaan biasanya juga menyimpan karya non-cetak seperti hasil rekaman audio, kaset dan video film seperti mikrofilm, mikrofis dan bahan elektronik lainnya seperti disket atau pita magnetik dan

elektronik yang berhubungan dengan teknologi komputer.<sup>11</sup>

Adapun sumber data primer adalah sumber data inti atau pokok yaitu Abdurrahman Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun Jilid III, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang diperoleh dari buku-buku karangan para penulis lainnya atau buku-buku yang lain yang berkaitan dengan kajian tokoh, judul atau rumusan masalah penelitian. Selain itu terdapat data penunjang yang merupakan data-data yang berasal dari berbagai sumber media cetak, internet, jurnal ilmiah atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan objek permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data atau variable yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Pengumpulan data dapat berupa buku, artikel, majalah, jurnal dan lain sebagainya. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisa dokumen, baik tertulis, gambar maupun elektronik.<sup>12</sup> Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan proses pengelolaan, mereduksi dan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian. Dengan ini penulis menganalisis data yang diperoleh dengan memilih pokok-pokok kajian yang sesuai dengan fokus penelitian dan selanjutnya mengkaji data dalam bentuk yang sistematis supaya mudah untuk dikuasai oleh peneliti dan pembaca.<sup>13</sup>

#### **Pembahasan**

Untuk memberikan penjelasan tentang negara dan perkembangannya dalam pemikiran Ibnu Khaldun, tidak dapat dilepaskan dari adanya 'ashabiyah.

<sup>8</sup> Abdurrahman Ibnu Khaldun, Muqaddimah, (Beirut: Dar al Fiqr, t.t), hlm. 191-193

<sup>9</sup> Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta : Paradigma, 2005), hlm. 58

<sup>10</sup> Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat..., hlm. 138

<sup>11</sup> Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 6

<sup>12</sup> Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 92

<sup>13</sup> Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif..., hlm. 69

‘Ashabiyyah adalah teori terpenting dari Ibnu Khaldun.

### 1. Pengertian dan Asal Usul ‘Ashabiyyah

Istilah ‘ashabiyyah berasal dari العَصَبِيَّة - العصب - عصب - عصبه yaitu arab bahasa yang artinya semangat golongan, atau partai.<sup>14</sup> Adapun istilah ‘ashabiyyah oleh Franz Rosenthal dalam buku Munawir Sjadzali, ke dalam bahasa Inggris disebut dengan group feeling dan secara harfiah dalam bahasa Indonesia adalah rasa satu kelompok atau solidaritas kelompok.<sup>15</sup>

Menurut Ibnu Khaldun, ‘ashabiyyah hanyalah didapati pada golongan yang dihubungkan oleh pertalian darah atau pertalian lain yang mempunyai arti sama. Tentunya hal ini disebabkan oleh pertalian darah mempunyai kekuatan mengikat pada kebanyakan umat manusia, yang membuat mereka itu ikut merasakan setiap kesakitan yang menimpa kaumnya itu adalah sesuai dengan kodratnya yang tertanam pada dirinya.<sup>16</sup>

Ibnu Khaldun memisahkan istilah ‘ashabiyyah menjadi dua pengertian; Pertama, bermakna positif dengan menunjuk pada konsep persaudaraan. Dalam sejarah peradaban Islam konsep ini membentuk solidaritas sosial masyarakat Islam untuk saling bekerjasama, mengesampingkan kepentingan pribadi, dan memenuhi kewajiban kepada sesama. Semangat ini kemudian mendorong terciptanya keselarasan sosial dan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam menopang kebangkitan dan kemajuan peradaban. Sedangkan pengertian yang kedua bermakna negatif, yaitu menimbulkan kesetiaan dan fanatisme

membuta yang tidak didasarkan pada aspek kebenaran.<sup>17</sup>

Konteks pengertian yang kedua inilah yang tidak dikehendaki dalam sistem pemerintahan dan tata nilai dalam masyarakat muslim. Karena akan mengaburkan nilai-nilai kebenaran yang diusung dalam prinsip-prinsip agama Islam. Dan Ibnu Khaldun menyetujui makna ‘ashabiyyah sebagai rasa persaudaraan diantara kaum muslimin. Menurut Abdul al-Raziq al Makkid dalam *The Political Theory Of Ibnu Khaldun* yang dikutip oleh Wendy Melfa ada lima bentuk ashabiyyah, yaitu:<sup>18</sup>

1. ‘Ashabiyyah kekerabatan dan keturunan. Ini adalah ‘ashabiyyah yang paling kuat.
2. ‘Ashabiyyah persekutuan yang terjadi karena keluarnya seseorang dari garis keturunannya yang semula ke garis keturunan lain.
3. ‘Ashabiyyah kesetiaan yang terjadi karena peralihan seseorang dari garis keturunan ke keturunan orang lain dan keturunan yang lain akibat dari persahabatan dan pergaulan yang tumbuh dari ketergabungan seseorang pada garis keturunan yang baru.
4. ‘Ashabiyyah penggabungan, yaitu ‘ashabiyyah yang terjadi karena larinya seseorang dari keluarga dan kaumnya dan bergabung pada keluarga dan kaum lain.
5. ‘Ashabiyyah perbudakan yang timbul dari hubungan antara para budak dan kaum Mawali dengan tuan-tuan mereka.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> <http://andyfamilies.blogspot.com/2011/04/solidaritas-sosial-ashabiyyah-menurut.html>. Diakses pada 31 Juli 2015

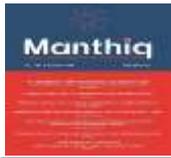
<sup>18</sup> Wendy Melfa dan Solihin S, *Paradigma Pengembangan Masyarakat Islam..*, hlm. 94

<sup>19</sup> Mawali adalah kaum muslimin yang bukan Arab, terutama dari bangsa Farsi dan Turki. Dalam catatan sejarah disebutkan, dahulu mawali mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari bangsa Arab ketika mereka berkuasa, khususnya pada masa dinasti Bani Umayyah. Mereka harus membayar pajak, dilarang kawin dengan bangsa Arab, bahkan di daerah Irak tempat shalat mereka

<sup>14</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 197), hlm. 936

<sup>15</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*, hlm. 104

<sup>16</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Terj. Ahmadie Thoha., hlm. 151-152



Terkait penjelasan yang dikemukakan oleh Abdul Raziq alMakki tersebut, penulis sependapat bahwa ‘ashabiyah tidak hanya terletak pada hubungan darah atau hubungan kekeluargaan semata, namun ‘ashabiyah juga didapati oleh sekelompok orang telah membentuk persekutuan. Tujuan terakhir ‘ashabiyah adalah kedaulatan. Sebab ‘ashabiyah itulah yang membuat orang menyatukan usaha untuk tujuan yang sama, mempertahankan diri, dan menolak atau mengalahkan musuh. Juga kita telah mengetahui bahwa tiap-tiap masyarakat umat manusia memerlukan kekuatan yang berfungsi mencegah, juga seorang pimpinan yang bisa mencegah manusia dari saling menyakiti. Pimpinan semacam itu harus mempunyai kekuatan pembantu di tangannya, sebab kalau tidak, maka ia tidak akan dapat menjalankan tugas pencegahan itu.<sup>20</sup>

Namun apabila suatu ‘ashabiyah dapat mengalahkan dan menaklukan ‘ashabiyah lain, keduanya akan bercampur baur dengan akrabnya, yang kalah memberi dukungan tenaga kepada yang menang, dan kemudian secara bersama-sama menuntut tujuan yang lebih tinggi dari kedaulatan dan dominasi yang dimiliki sebelum itu. Demikianlah terus menerus sehingga kedaulatannya sama dengan kedaulatan negeri yang sedang berkuasa. Akhirnya, apabila negara yang berkuasa itu sudah tua umurnya dan para pembesarnya yang terdiri dari satu ‘ashabiyah sudah tidak lagi mendukungnya, maka ‘ashabiyah yang baru itu pun merebut kedaulatan negara yang sedang berkuasa itu.<sup>21</sup>

---

dipisahkan. Lihat Wendy Melfa dan Solihin Siddiq, *Paradigma Pengembangan Masyarakat Islam...*, hlm. 94

<sup>20</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Terj. Ahmadi Thoha..., hlm. 166

<sup>21</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Terj. Ahmadi Thoha..., hlm. 167

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, kekuasaan politik dan kedaulatan dapat dikatakan sebagai bentuk keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan untuk seluruh manusia dan menjadi wakil-Nya guna menerapkan syariat-syariat Tuhan di muka bumi ini. Kemudian hukum atau syariat tersebut diberikan pada umat manusia untuk halhal baik dan mewujudkan kesejahteraan, sebab kebaikan akan datang kepada orang-orang yang mampu melaksanakan hukum Tuhan di jalan yang baik dan benar. Dapat penulis katakan bahwa, hakikat ‘ashabiyah apabila tidak dibarengi dengan gerakan agama maka tidak akan terwujud. Dikarenakan rakyat tidak dapat berjuang atau digerakkan kalau bukan karna bantuan solidaritas tersebut, oleh karena itu agama sangat berperan penting dalam mencapai suatu ‘ashabiyah. Untuk dapat mendiskusikan sebuah tatanan politik dan negara yang ideal dalam perspektif Ibnu Khaldun yang sistem dan strukturnya tidak lepas dari syariat Islam, maka dalam hal ini akan dijelaskan sedikit banyaknya tentang keterlibatan syariat Islam dalam bermasyarakat dan bernegara.<sup>22</sup> Diantaranya:

#### **1. Agama Sebagai Pemersatu**

Ibnu Khaldun mengutarakan peran penting agama, khususnya Islam dalam kehidupan sosial politik, yaitu sebagai faktor pemersatu dan pengutuh masyarakat. Bahkan, apabila kekuatan agama berdampingan dengan ‘ashabiyah, secara dialektik akan memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan integritas kekuasaan politik. Sebaliknya, jika agama dan ‘ashabiyah dipertentangkan akan mempercepat munculnya disintegrasi suatu negara. Dalam pemikiran Ibnu Khaldun banggunya suatu negara berhubungan erat dengan superioritas suatu ‘ashabiyah terhadap yang lainnya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Syafiuddin, *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun*, hlm. 156.

<sup>23</sup> Syafiuddin, *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun...*, hlm. 156

Walau 'ashabiyah merupakan teori terpenting Ibnu Khaldun dalam kaitannya dengan eksistensi dan perkembangan suatu negara, peran agama dalam negara justru terkadang jauh lebih besar daripada peran ashabiyah itu sendiri, meskipun kajian utama Ibnu Khaldun bukanlah tentang agama Islam.<sup>24</sup>

Ibnu Khaldun mengemukakan salah satu contoh konkret dari apa yang ia kemukakan adalah bangsa Arab. Sebagaimana kita ketahui, kekasaran watak dan kerasnya kehidupan membuat bangsa Arab sulit tunduk pada penguasa. 'Ashabiyah memang membuat mereka dapat eksis, tetapi agama justru mampu mengubah karakter mereka, bahkan membuat mereka mampu memerintah.<sup>25</sup>

Untuk menyatakan betapa besar peran agama tersebut, Ibnu Khaldun dalam sebuah pasal Muqaddimah yang berjudul "Bangsa Arab adalah suatu bangsa diantara kelompok umat manusia yang paling tidak cocok mempunyai kekuasaan politik" mengatakan sebagai berikut:

"Penyebabnya ialah karena mereka lebih bersifat pengembara dibanding dengan kelompok manusia lainnya. Mereka lebih leluasa bergerak di padang pasir karena kesederhanaan dan kerasnya kehidupan mereka. Mereka tidak terlalu membutuhkan gandum dan hasil pertanian lainnya. Karena itu, mereka tidak mudah tunduk pada kekuasaan."<sup>26</sup>

Terkait dengan apa yang dimaksudkan oleh Ibnu Khaldun di atas, penulis dapat mengambil benang merahnya yaitu di dalam mewujudkan suatu kekuatan kelompok pada masyarakat, kontribusi agama Islam tidak ada yang dapat mengalahkan posisinya dalam

membangun sebuah negara yang luas dan besar, perlu disadari bahwa dengan nilai-nilai Islam baik itu yang datang langsung dari Nabi atau kebenaran risalah akan dapat memperluas daerah kekuasaan negara. Bersatunya hati manusia itu tidak terlepas dari pertolongan Allah, yaitu dengan memeluk agama yang sama. Untuk memperkuat argumennya, Ibnu Khaldun mengutip sebuah ayat alQur'an yaitu:

"Walau kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya engkau tidak dapat mempersatukan hati mereka."<sup>27</sup>

Jika kebenaran merupakan tujuan utama mereka, tak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi mereka. Sebab, pandangan mereka telah sama dan tujuan yang mereka kejar juga satu dan sama sehingga membuat mereka bersedia berjuang sampai mati. Sebaliknya, golongan yang saling bertentangan, tidak bersatu, tidak mempunyai tujuan yang benar, tidak akan rela mati memperjuangkan sesuatu.<sup>28</sup>

Mengenai hal ini Ibnu Khaldun menulis sebagai berikut: Rahasiannya ialah bila hati telah terpancung untuk melakukan kejahatan dan kecenderungan pada dunia, kecemburuan asli muncul dan perpecahan semakin meluas. Bila hati cenderung pada kebenaran, menolak dunia dan kebatilan, serta tunduk kepada Allah saja, maka tujuan akan menyatu. Kecemburuan pun menjadi lenyap dan pertentangan semakin berkurang. Kerja sama sarta persatuan menjadi lebih baik, karenanya daerah kekuasaan semakin meluas dan negara pun bertambah kuat.<sup>29</sup>

Demikian demikian, penulis berpendapat bahwa kedudukan nilai-nilai Islam di dalam sebuah negara telah terlihat jelas pada pencapaian kekuasaan. Dengan kebenaran yang di dapatkan oleh setiap

<sup>24</sup> Syafiuddin, Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun..., hlm. 156-157

<sup>25</sup> Syafiuddin, Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun..., hlm. 157

<sup>26</sup> Syafiuddin, Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun..., hlm. 157

<sup>27</sup> QS Al-Anfal (8) : 63

<sup>28</sup> Syafiuddin, Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun..., hlm. 159

<sup>29</sup> Ibnu Khaldun, Muqaddimah..., hlm. 103

kelompok atau golongan akan mampu menyatukan hati mereka karena mempunyai tujuan dan pandangan yang sama. Oleh karenanya, mereka akan berjuang dengan gigihnya dalam mempertahankan kebenaran walaupun harus siap untuk mati.

Dengan demikian semangat ajaran Islam yang mereka miliki akan menciptakan rasa persatuan dan mampu melenyapkan segala permasalahan dan ketidaksenangan antara kelompok satu dengan anggota kelompok lainnya dan kemudian mengajak dan menuntun mereka ke jalan yang lebih baik. Semua ini berkat petunjuk dan pertolongan dari Allah yang maha kuasa akan segala sesuatu untuk menyatukan hati manusia yang mempunyai semangat agama di dalam memperoleh kebenaran, serta kekuasaan negara akan bertambah luas dan kuat dengan sendirinya.

## 2. Agama Sebagai Pendorong Keberhasilan

Selain berperan sebagai alat pemersatu, agama juga dapat menjadi faktor pendorong keberhasilan. Menurut Ibnu Khaldun, meskipun kehidupan sosial dapat berlangsung tanpa adanya agama, dan politik dapat tegak tanpa aturan agama, agamalah yang berperan mendorong perkembangan kemajuan dan menjadikan kehidupan sosial ke arah yang lebih baik.<sup>30</sup>

Ibnu Khaldun dalam satu subbab dari Muqaddimah yang berjudul “Seruan Islam memperkokoh kekuatan ‘ashabiyyah yang dipupuk negara” sebagai lanjutan dari pembahasan sebelumnya, menyebutkan bahwa kesatuan tujuan dan semangat agama telah membawa keberhasilan tentara Islam pada periode awal penaklukan. Ia memberikan contoh peperangan Yarmuk dan Qadisiyah. Walaupun tentara Islam jumlahnya sedikit dengan peralatan perang yang sederhana jika dibanding dengan tentara Parsi dan Heraclius, kedua tentara itu tidak sanggup berhadapan

dengan tentara Islam, dan keduanya dikalahkan. Tentunya keberhasilan dan kemenangan yang luar biasa tersebut sangat bertentangan dengan semua realita hukum peperangan. Dan menurut Ibnu Khaldun keberhasilan ini terjadi karena syari’at Islam.<sup>31</sup>

interpretasikan peristiwa-peristiwa sejarah, tidak sedikit pun mengabaikan peran agama. Bahkan, ia menekankan betapa penting agama bagi bangsa Arab dan kebangkitan mereka, dan juga menekankan pentingnya agama bagi negara. Ibnu Khaldun memproyeksikan hal itu justru pada masyarakat nomad yang paling sukar ditundukkan, apalagi dipimpin oleh orang lain. Berkat peran agama mereka mampu meraih keberhasilan politik.<sup>32</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya, syari’at Islam tidak hanya dijadikan sebagai alat untuk mempersatukan manusia tetapi juga sebagai pendorong akan keberhasilan dalam menjalankan kehidupan sosial menjadi terarah. Walau kata Ibnu Khaldun kehidupan sosial dapat berjalan tanpa dengan agama dan juga politik dapat ditegakkan pula tanpa aturan agama. Akan tetapi justru dengan syari’at agamalah keberhasilan politik dapat dicapai sebagaimana dengan peristiwa-peristiwa dalam sejarah.

## 3. Agama Sebagai Legitimasi Sistem Politik

Agama sebagai legitimasi sistem politik, bagi dunia Islam sejak dulu sampai saat sekarang masih ada, baik dalam tetaran ide maupun dalam praktiknya. Bagi pemikir yang berpendirian bahwa Islam itu serba lengkap, agama dan negara harus menjalin hubunganyang menyatu, dan yang merindukan kembalinya sistem khilafah, maka

<sup>30</sup> Syafiuddin, Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun..., hlm. 161

<sup>31</sup> Ibnu Khaldun, Muqaddimah..., hlm. 138

<sup>32</sup> Syafiuddin, Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun, hal. 161-162.

agama akan tetap berperan sebagai legitimasi politik.<sup>33</sup>

Keterlibatan agama dengan politik, dalam hal ini Islam dan negara, merupakan suatu fenomena sistem sosio-religi-politik tersendiri. Hal ini dimungkinkan karena Islam sejak periode awal adalah agama yang terlibat langsung dengan politik, agama dan negara merupakan satu kesatuan. Nabi sebagai pemimpin agama juga sekaligus sebagai kepala negara. Di masa Nabi, walau bukan dimaksudkan untuk melegitimasi sistem politik, agama telah berperan demikian. Berbagai kebijaksanaan politik tidak sekadar dilegitimasi bahkan dijustifikasi oleh ajaran agama, jika tidak oleh alQur'an setidaknya oleh hadis Nabi. Hal ini dapat dilihat dalam sistem politik Islam, antara lain persyaratan kepala negara, kontrak sosial, keharusan taat kepada pemimpin, majelis syura' sebagai pencerminan semangat demokrasi, dan lainnya.<sup>34</sup>

Dapat penulis katakan bahwa, selain syari'at Islam sebagai faktor pendukung keberhasilan, agama Islam juga dapat berfungsi sebagai legitimasi sistem politik. Karenanya agama Islam telah disahkan menjadi bagian yang penting dalam sistem politik baik itu dilihat dari teori ataupun prakteknya. Dalam periode sejarah Islam telah dikatakan bahwa agama sudah mempengaruhi perpolitikan di dalam kepemimpinan Nabi Muhammad yang merupakan seorang kepala negara merangkap sebagai kepala atau pemimpin agama.

#### 4. 'Ashabiyyah dalam Pemerintahan Islam

Dalam Islam, negara harus menyiapkan kebutuhan rakyatnya, baik yang muslim maupun non muslim mulai dari pakaian, makanan, pengobatan, dan

sebagainya. Bahkan pelayanan yang lebih intensif kepada yang membutuhkan, harus dapat dipenuhi oleh negara melalui suatu kelompok. Kelompok tersebut membentuk sebagai gerakan solidaritas atau kesetiakawanan sosial.<sup>35</sup>

Adapun dari penjelasan di atas, bahwasanya Islam telah mengatur akan apa-apa yang menjadi setiap kebutuhan pada manusia, kaitan dalam hal ini negara diperlukan adanya untuk memenuhi setiap kebutuhan baik itu materi maupun non materi. Dengan adanya suatu kelompok yang memunculkan suatu negara, maka dengan rasa kelompok tersebut akan dapat terlaksana tujuan bersama.

Dalam pada itu, suatu negara hanya akan bisa ditegakkan atas bantuan dari solidaritas sosial atau yang dalam istilah Ibnu Khaldun disebut 'ashabiyyah. Dengan memiliki 'ashabiyyah yang kuat dan anggota-anggotanya sanggup berjuang dan bersedia mati demi tujuan bersama maka, dengan begitu negara dapat berdiri dengan dukungan rasa persatuan dan 'ashabiyyah yang kuat. Ini merupakan suatu gejala yang alami bagi manusia dalam proses berdirinya negara atau pemerintahan.<sup>36</sup>

Penulis berpendapat bahwasanya, sebuah pemerintahan dapat terwujud dengan baik bilamana di dalam pemerintahan tersebut terdapat suatu kelompok yang mempunyai perasaan yang sama dan membentuk suatu kekuatan yang sempurna, maka dari situlah negara berdiri dengan semangat yang luar biasa dan rasa kelompoknya sangat tinggi.

Setelah negara berdiri karena adanya dukungan dan semangat 'ashabiyyah yang tinggi, maka diperlukannya seorang kepala negara agar mampu secara efektif mengendalikan ketertiban negara dan melindunginya, baik terhadap gangguan dari dalam maupun terhadap ancaman dari luar,

<sup>33</sup> Syafiuddin, Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun..., hlm. 164

<sup>34</sup> Syafiuddin, Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun..., hlm. 165-166

<sup>35</sup> Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam..., hlm. 261

<sup>36</sup> Muhammad Azhar, Filsafat Politik..., hlm. 101



harus memiliki wibawa yang besar dan kekuatan fisik yang memadai. Untuk itu pemimpin atau penguasa memerlukan 'ashabiyyah yang besar dan kuat berupa loyalitas dari kelompoknya dalam menghadapi tantangan, terhadap otoritas dan kekuasaannya.<sup>37</sup>

Orang-orang yang memiliki 'ashabiyyah dan lalu ia telah menduduki jabatan kepala negara serta ditaati orang, jika suatu ketika menemukan jalan untuk memiliki kedaulatan, ia tidak akan mengabaikannya sebab kedaulatan itulah yang diharapkan. Kedaulatan merupakan tujuan akhir dari 'ashabiyyah.<sup>38</sup> Syariat Islam tidak mengancam kedaulatan itu sendiri dan tidak pula melarang pelaksanaannya. Islam hanya mencela akibat buruk yang ditimbulkannya, seperti tirani, kezaliman, dan hidup mewah. Kedaulatan akan dicapai jika mempunyai sifat yang dibebankan oleh yaitu dengan memuji keadilan, kejujuran, melaksanakan tugas-tugas agama dan membelanya. Inilah kedaulatan yang paling mulia yang dilaksanakan oleh para Nabi.<sup>39</sup>

Suatu pemerintahan akan lebih kuat keberadaannya selain adanya dukungan dari 'ashabiyyah, tetapi juga peran agama Islam. Islam merupakan kekuatan kedua setelah 'ashabiyyah dalam kehidupan bernegara. Ibnu Khaldun mengedepankan suatu 'ashabiyyah yang tanpanya negara tidak bisa eksis. Nilai Islam merupakan pendukung 'ashabiyyah dan pada dasarnya juga memperkuat 'ashabiyyah.<sup>40</sup>

Kontribusi adanya 'ashabiyyah yang kuat terhadap eksistensi suatu negara sangat

diperlukan, sebab tanpa bantuan 'ashabiyyah negara tidak akan bisa tercapai. Perannya yang amat besar dan kuat akan dapat menopang berdiri, dan berkembangnya suatu negara atau pemerintahan. Dalam era modern ini bukan hanya pada pemerintahan Islam saja yang tanpa agama negara tidak dapat kokoh, melainkan pemerintahan secara umum sekalipun dituntut untuk mengaitkan agama sebagai penguat dalam mempertahankan pemerintahan tersebut.

Dalam kenyataannya nasib para pemimpin mereka pada umumnya tergantung kepada mereka. Sebab 'ashabiyyah mereka itulah yang mempertahankan kelompok mereka, dan mereka baru sanggup memerintah setelah agama mengubah karakternya, menghilangkan kekurangan-kekurangan dan membimbing mereka hingga dapat menahan diri sendiri, dan mencegah orang lain mengganggu hak-hak sesamanya.<sup>41</sup>

Terlihat jelas bahwasanya, telah diketahui bangsa Arab adalah masyarakat dalam negara Islam yang pada mulanya sebelum Islam datang, mereka mempunyai sifat yang amat tercela atau pada zaman jahiliyah. Disana masyarakatnya penuh dengan sikap sombong, angkuh, kasar, tidak mau tunduk pada pemimpin dan lainnya, akan tetapi setelah Islam datang yang disyarkan oleh para Nabi, maka dengan adanya Islam mereka menjadi kebalikan dari sikap di atas. Kelompok yang telah bersatu dan dapat membangun sebuah peradaban, hal itu yang menyebabkan bangsa Arab termasuk dalam kelompok yang memiliki solidaritas yang kuat dan berwibawa karena di dalam diri mereka terdapat persamaan akidah yang kemudian terciptanya pemerintahan dengan nilai-nilai Islam.

Dengan mengikuti alur pandang Ibnu Khaldun, maka teori 'ashabiyyah mempunyai

<sup>37</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*, hlm. 105

<sup>38</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Terje. Ahmadie Thoha..., hlm. 166

<sup>39</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Terje. Ahmadie Thoha..., hlm. 237

<sup>40</sup> Wendy Melfa dan Solihin Siddiq, *Paradigma Pengembangan Masyarakat Islam...*, hlm. 90

<sup>41</sup> Syafiuddin, *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun...*, hlm. 158



relevansi yang kuat dengan agama dan negara. menurutnya, kekuatan suatu 'ashabiyyah tidak akan memadai jika hanya berdasarkan kekuatan fisik semata. Ia juga harus memiliki kekuatan moral dan akhlak yang bersumber dari ajaran Islam. Manusia dengan kelebihan dan kekurangan yang ada perlu dibimbing kepada kebaikan. Untuk itu, kekuasaan dalam pemerintahan haruslah berpegang pada nilai-nilai Islam.<sup>42</sup>

### **Kesimpulan**

Dari uraian yang telah paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk memberikan penjelasan tentang negara dan perkembangannya dalam pemikiran Ibnu Khaldun, tidak dapat dilepaskan dari adanya 'ashabiyyah. 'Ashabiyyah adalah teori terpenting dari Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, 'ashabiyyah hanyalah didapati pada golongan yang dihubungkan oleh pertalian darah atau pertalian lain yang mempunyai arti sama. Tentunya hal ini disebabkan oleh pertalian darah mempunyai kekuatan mengikat pada kebanyakan umat manusia, yang membuat mereka itu ikut merasakan setiap kesakitan yang menimpa kaumnya itu adalah sesuai dengan kodratnya yang tertanam pada dirinya.<sup>43</sup> Dalam Islam, negara harus menyiapkan kebutuhan rakyatnya, baik yang muslim maupun non muslim mulai dari pakaian, makanan, pengobatan, dan sebagainya. Bahkan pelayanan yang lebih intensif kepada yang membutuhkan, harus dapat dipenuhi oleh negara melalui suatu kelompok. Kelompok tersebut membentuk sebagai gerakan solidaritas atau kesetiakawanan sosial.<sup>44</sup> Untuk dapat mendiskusikan sebuah tatanan politik dan negara yang ideal dalam perspektif Ibnu Khaldun yang sistem dan strukturnya tidak

lepas dari syariat Islam, maka dalam hal ini akan dijelaskan sedikit banyaknya tentang keterlibatan syariat Islam dalam bermasyarakat dan bernegara.<sup>45</sup> Diantaranya: a). Agama Sebagai Pemersatu; b). Agama Sebagai Pendorong Keberhasilan; c). Agama Sebagai Legitimasi Sistem Politik.

Diharapkan pemikiran Ibnu Khaldun tentang teori 'ashabiyyahnya yang melambungkan namanya di dunia Timur maupun Barat, dapat dijadikan sebagai tolak ukur di dalam membangun masyarakat, peradaban, dan pemerintahan/negara, yang pemikiran politiknya tersebut tidak luput dari nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Agar kiranya pemikiran Ibnu Khaldun yang tertuang dalam karyanya Muqaddimah yang monumental ini dapat memberikan kontribusi yang lebih dalam kaitannya dengan ilmu sosiologi dan disiplin ilmu lainnya.

### **Daftar Pustaka**

- Azhar, Muhammad. 1996. *Filsafat Politik: Perbandingan Antara Islam dan Barat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Husni, Noviandi. 2011. *Solidaritas Sosial Ashabiyyah*  
<http://andyfamilies.blogspot.com/2011/04/solidaritas-sosial-ashabiyyahmenurut.html>. Diakses pada 31 Juli 2015.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution. 2010. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta : Paradigma.
- Khaldun, Muhammad Ibnu. 1986. *Muqaddimah*. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Melfa, Wendy dan Solihin Siddiq. 2007. *Paradigma Pengembangan Masyarakat Islam: Studi Epistemologis Pemikiran*

<sup>42</sup> Syafiuddin, *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun...*, hlm. 162

<sup>43</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Terj. Ahmadie Thoha., hlm. 151-152

<sup>44</sup> Dhiyuddin Rais, *Teori Politik Islam...*, hlm. 261

<sup>45</sup> Syafiuddin, *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun*, hlm. 156.



- Ibnu Khaldun. Bandar Lampung: Matakata.
- Munawwir, A.W. 1997. Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nabhani, Taqiyudin An. 1995. Sistem Khilafah: Konsep Kenegaraan dan Kepemimpinan Umat Islam Seluruh Dunia, Terj. Muhammad Al Khaththath dkk. Jakarta: Khazanah Islam.
- Rais, Dhiauddin. 2001. Teori Politik Islam. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sjadzali, Nunawir. 1993. Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran. Jakarta: UI Press, 1993.
- Syafiuddin. 2007. Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun. Yogyakarta : Gema Media.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. Metodologi Penelitian Praktis, Yogyakarta: Teras.
- Zed, Mestika. 2004. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.